

**PERAN KOMUNITAS DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS POLA PILAH
KUMPUL OLAH TERHADAP REDUKSI SAMPAH KOTA**
**The Role of Community in Solid Waste Management Based on Pattern Sorting,
Collecting and Treating to Reduce City Waste**

¹Sri Darwati, ²Fitriyani Anggraini

Pusat Litbang Permukiman, Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum
Jl. Panyaungan, Cileunyi Wetan-Kabupaten Bandung 40393

¹E-mail : darwa69@yahoo.com

²E-mail : fitrijaniana@yahoo.com

Diterima : 08 April 2012 ; Disetujui : 02 Januari 2012

Abstrak

Komunitas memegang peranan kunci dalam perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul-angkut-buang menjadi pilah-kumpul-olah. Probolinggo merupakan kota yang berhasil dalam melibatkan peran komunitas dalam pemilahan sampah. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dimulai dengan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam pemilahan dan pengumpulan sampah rumah tangga. Pemda Probolinggo menetapkan kebijakan terkait dengan Sistem Pemilahan dan Pengumpulan Sampah dan memfasilitasi masyarakat dalam pelatihan, pendanaan dan penguatan kelembagaan. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komunitas, organisasi masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan pola pilah kumpul dengan mengambil studi kasus Kota Probolinggo dalam menunjang reduksi sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. Metoda pengumpulan data diperoleh dari data sekunder, observasi lapangan, wawancara terstruktur dengan pengelola persampahan. Metode analisis dilakukan deskriptif evaluatif terhadap aspek teknis, pembiayaan dan kelembagaan. Disimpulkan bahwa kunci keberhasilan dalam pola pilah kumpul olah adalah perubahan perilaku masyarakat serta adanya fasilitasi tokoh masyarakat dan pemerintah. Pola pilah kumpul dilakukan masyarakat dan olah dilakukan oleh pemerintah di unit pengomposan di TPA. Untuk meningkatkan pemasaran, pola pemasaran kompos dengan ketentuan keuntungan 70% untuk kelompok masyarakat dan 30% untuk Dinas Kebersihan merupakan upaya yang efektif dalam mendorong partisipasi dan memberikan reward terhadap masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pengumpulan di sumber.

Kata Kunci : Peran, komunitas, pengelolaan sampah, pilah, kumpul, olah, reduksi

Abstract

Community has a key role in paradigm change of solid waste management based on collecting-transporting-dumping to sorting-collecting-treating. Probolinggo is a city succeeded in increasing the role of community participation concerns with solid waste sorting. The community to organize Community Grouping sorting and collecting of solid waste. The Local Government of Probolinggo set policy concern with Sorting System and Collecting of Solid Waste and facilitated to the community in training, financing and strengthening the community institution. This paper focus on description of the community role, community organization and Government in implementation pattern of collecting-transporting-dumping to sorting-collecting-treating with the case study of Probolinggo city to reduce solid waste at Final Processing Site. Methodology of data collection are secondary data, field observation, interview. The analysis by descriptive evaluative of technical, financial and institutional aspects. In conclusion, the key success in sorting-collecting-treating are the change of community behavior with the facilitated by community leader and government. The sorting-collecting of solid waste is done by community and treating of solid waste is done by the Cleaning Agency at composting site creates a role sharing and partnership between Community and The Cleaning Agency. To improve the compost marketing, the pattern with benefit sharing of compost 70% for community group and 30% for the Cleaning Agency is on effective effort in encouraging participation and rewarding to the community in doing the sorting and collection at source.

Keywords : Role, community, solid waste management, sorting, collecting, treating, reduction

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata
Perdesaan, Departemen Permukiman dan

Prasarana Wilayah (2003) menyebutkan bahwa pada lima tahun terakhir ini pengelolaan kebersihan kota di Indonesia mengalami

penurunan sebagai akibat timbulnya krisis ekonomi. Pada tahun 2000 hanya 32,1% penduduk perkotaan yang mendapat pelayanan persampahan atau sejumlah 35,2 juta orang dari penduduk sejumlah 109,4 juta di 384 kota seluruh Indonesia. Kondisi ini jauh lebih buruk dari kondisi hasil catatan Biro Statistik tahun 1998, dimana 49,9% penduduk dapat terlayani. Situasi yang digambarkan di atas menggambarkan beratnya untuk mengusahakan pelayanan pengelolaan persampahan dalam memenuhi target kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi Johannesburg pada tahun 2015. Targetnya adalah tambahan pelayanan 50% dari yang belum memperoleh pelayanan selama ini. Tambahan pelayanan yang diusahakan ini merupakan amanat yang tertuang dalam *Millenium Development Goal* (MDG), bahwa pada tahun 2015 minimal 50% penduduk yang selama ini belum terlayani akan mendapat pelayanan pengelolaan persampahan.

Salah satu upaya percepatan pencapaian target MDG adalah penerapan pola pilah kumpul dan olah dalam pengelolaan masyarakat. Penerapan pola ini memerlukan peran aktif masyarakat sebagai pelaku kunci pengelolaan sampah di sumbernya.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komunitas, organisasi masyarakat dan pemerintah dalam menerapkan pola pilah kumpul dan olah dengan mengambil studi kasus kota Probolinggo dalam menunjang reduksi sampah di TPA.

KAJIAN PUSTAKA

Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, BAB IX PERAN MASYARAKAT, Pasal 28 menyebutkan :

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan / atau pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

Dalam melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan sanitasi ini, Kementerian Pekerjaan

Umum sudah mengeluarkan kebijakan dan strategi persampahan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006) yang memuat 5 (lima) butir kebijakan sebagai berikut :

- Kebijakan (1) : Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya
- Kebijakan (2) : Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan
- Kebijakan (3) : Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan
- Kebijakan (4) : Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan
- Kebijakan (5) : Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Keinginan pemerintah mengedepankan pendekatan 3R telah secara nyata dikemukakan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 21/PRT/M/2006 yang memfokuskan upaya 3R sebagai strategi nasional yang menggariskan bahwa sampai tahun 2014 pengurangan sampah hendaknya mencapai 20%. Target strategi nasional pada sektor pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian tingkat pelayanan pengolahan sampah 60% pada tahun 2010.
2. Mendukung pengurangan jumlah sampah melalui 3R sampai 20% pada tahun 2014.
3. Meningkatkan kualitas *landfill* :
 - *Controlled Landfill* (CLF) untuk kota kecil dan menengah.
 - *Sanitary Landfill* (SLF) untuk kota besar dan kota metropolitan.
 - Penghentian *Open Dumping*.
4. Mendukung pelaksanaan di tingkat institusi dan kerjasama regional.

Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 5 sebagai berikut :

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan Peningkatan Peran Masyarakat

Pada umumnya, ada 3 pendekatan dalam mengoptimalkan interaksi antara masyarakat umum dengan pengelolaan sampah kota.

1. Peningkatan kesadaran masyarakat

Pendekatan ini didasarkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan berimplikasi terhadap pengurangan pembuangan sampah secara ilegal dan menjamin kerjasama yang baik dalam program pengumpulan, pemilahan dan pengolahan sampah kota.

Motif masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah adalah :

- Kemungkinan pengurangan biaya pengumpulan sampah.
- Ketertarikan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

2. Penyediaan pelayanan yang baik

Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat secara otomatis akan berpartisipasi jika prasarana pengumpulan sampah dekat dan mudah dijangkau termasuk bagi anak-anak dan pelayanan masyarakat dan pengangkutan sampah berjalan teratur sehingga terjaga kebersihan lingkungan.

3. Peraturan lingkungan

Pendekatan ini didasarkan bahwa masyarakat akan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah jika ada peraturan lingkungan yang ketat yang disertai dengan sanksi bagi yang melanggar. Hal ini membutuhkan monitoring yang mahal terhadap pengendalian perilaku masyarakat.

Peran Masyarakat dalam Pola Pilah Kumpul Olah

Pengelolaan sampah saat ini masih mengandalkan sistem konvensional yaitu kumpul-angkut-buang sehingga masih bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sedangkan TPA yang tersedia sangat terbatas sesuai dengan umur pakai (Riatno, P., Setijati, H., dan Vidyaningrum W., 2007). Kondisi demikian menuntut perubahan paradigma pengolahan menjadi pola pilah, kumpul dan olah (Sonhadji, 2008).

Perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul, angkut dan buang menjadi pola pilah, kumpul dan olah membutuhkan pelibatan aktif masyarakat. Pilah dan kumpul dilakukan oleh masyarakat sejak dari sumber yaitu rumah tangga, selanjutnya olah dilakukan oleh pemerintah sebelum masyarakat sendiri mampu melakukan pengolahan.

Tanpa adanya peran serta masyarakat, program pengelolaan persampahan yang direncanakan banyak yang gagal. Salah satu pendekatan masyarakat untuk membantu keberhasilan program pemerintah adalah membiasakan tingkah laku masyarakat sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar

dan merata; merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan merubah faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat (Ni Komang Ayu Artiningsih, 2008).

Pengalaman Beberapa Kota Dalam Reduksi Sampah Melalui Program 3R

Beberapa kota telah cukup berhasil melakukan program 3R yang menunjang reduksi sampah kota hingga 7-8% antara lain Cimahi dan Jakarta. Saat ini produksi sampah rumah tangga di Kota Cimahi masih mencapai 1.300 meter kubik per hari. Namun, jumlah itu telah berhasil direduksi hingga 7-9 persen per tahun. Reduksi dilakukan dengan pemilahan dan pengolahan sampah menjadi produk *kriya* dari tingkat rumah tangga dan pengomposan. (www.pikiranrakyat.com, 18 Maret 2011).

Program pengelolaan sampah melalui konsep 3R yang digalakkan Pemprov DKI Jakarta mulai membuahkan hasil. Setidaknya, sekitar tujuh persen sampah dari total produksi 29.344 meter kubik per hari atau 6.525 ton per hari. Pengurangan terjadi di 94 titik. Dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2007-2012, sampah harus dapat dikurangi 12 hingga 15 persen. Sehingga, selain pembangunan TPST, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengelola sampah sendiri. Pengelolaan sampah di Jakarta saat ini dilakukan dengan sistem swastanisasi dengan penerapan teknologi tinggi untuk mengarahkan pengolahan bisa berdampak menjadi aset daerah. (<http://megapolitan.infogoe.com/dki-berhasil-reduksi-sampah-7-persen>).

METODOLOGI PENELITIAN

Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara terstruktur terhadap 10 responden *stakeholder* kunci yaitu: (1) Bagian Teknis Persampahan, Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo (2) Pengelola UPTD Komposting di TPA Probolinggo (3) Pengelola Pokmas (4) Pengelola PAPESA (5) Pengelola Komunitas FORJAMANSANA (6) Pengelola Komunitas Eco-Pesantren (7) Pengelola Komunitas Rembug KAHBI (8) Pengelola Paguyuban Kader Lingkungan (PKL) (9) Ketua RT/RW (10) Kader Lingkungan. Data wawancara terhadap pemerintah berupa data karakteristik fisik daerah penelitian dan data mengenai kondisi sistem pengelolaan sampah yang ada meliputi sarana persampahan yang tersedia, pengelolaan persampahan serta timbulan sampah Kota Probolinggo. Wawancara terhadap komunitas meliputi peran dalam pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan sampah organik, sosialisasi, perencanaan program, pelatihan, dialog, *partnership* dan pendanaan. Wawancara terhadap masyarakat

meliputi peran dan kerjasama dengan pemerintah dalam pola pilah, kumpul dan olah. Metode analisis dilakukan deskriptif evaluatif terhadap aspek pembiayaan dan kelembagaan.

HASIL

**Pengelolaan Sampah Kota Probolinggo
Visi dan Misi Bidang Persampahan**

Probolinggo terletak di Jawa Timur. Penduduk pada tahun 2008 adalah sebesar 216.833 jiwa (<http://probolinggokota.go.id>, Januari 2011).

Kota Probolinggo merupakan kota sedang yang mempunyai visi : mewujudkan pemanfaatan sampah berbasis komunitas untuk menunjang terwujudnya Probolinggo bersih, hijau dan lestari. Untuk mencapai visi tersebut, misi yang diemban adalah :

1. memfasilitasi pemilahan dan pengumpulan sampah sejak dari sumber sampah
2. melaksanakan pengolahan sampah
3. melaksanakan distribusi hasil pengolahan sampah

4. melaksanakan diseminasi dan sosialisasi pengolahan sampah dan pemanfaatannya
5. mengembangkan pengelolaan sampah berbasis komunitas

Visi dan misi tersebut diwujudkan dengan berpegang pada nilai-nilai dasar, yaitu :

1. Komitmen dalam menjalankan tugas
2. Mengupayakan keberlanjutan program
3. Melibatkan peran serta masyarakat
4. Berprinsip kerja *learning by doing*

Pengelolaan Sampah

- Produksi dan Komposisi Sampah ditampilkan pada tabel 1, tabel 2 dan tabel 3.

Tabel 1 Volume Timbulan Sampah Kota Probolinggo

No	Sumber Sampah	Volume Timbulan Sampah (m ³ /hari)
1.	Permukiman	512,11
2.	Industri	186,3
3.	Pasar	84,8
4.	Fasilitas perdagangan	44,2
5.	Fasilitas kesehatan	3
Total		830,41

Sumber : BLH-Bidang Kebersihan, 2007

Tabel 2 Komposisi Sampah Kota Probolinggo

No	Jenis Penggunaan Lahan	Komposisi Sampah (%)					
		Organik	Kertas	Plastik	Kaca	Logam	Lainnya
1.	Perumahan	76,14	12,00	9,29	1,14	-	1,43
2.	Fasilitas perdagangan dan jasa	17,70	37,23	42,12	-	-	2,95
3.	Fasilitas kesehatan	32,00	29,00	31,00	-	3,00	5,00
4.	Pasar	92,00	1,00	7,00	-	-	-
5.	Industri	53,36	36,67	10,00	-	-	-
Rata-rata		49,36	27,93	19,00	0,19	0,5	2,68

Sumber : BLH-Bidang Kebersihan, 2007

Tabel 3 Volume Sampah yang Terangkut Ke TPA Probolinggo

No	Sumber Sampah	Rata-rata Per Hari (m ³)	Rata-rata Per Bulan (m ³)	Total 1 Tahun (m ³)	%
1.	Permukiman	128,1	3.896,3	46.755	32,8
2.	Industri	93,3	2.838,9	34.067	23,9
3.	Pasar	73,4	2.232,6	26.791	18,8
4.	Pertokoan	38,7	1.176,8	14.121	10,0
5.	Perkantoran	23,1	703,8	8.446	5,9
6.	Hotel dan restoran	16,9	514,1	6.169	4,4
7.	Alun-alun dan terminal	13,4	407,0	4.884	3,4
8.	Fasilitas kesehatan	3,7	111,1	1.333	0,9
Total		390,5	11.880,5	142.566	100,0

Sumber : BLH-Bidang Kebersihan, 2008

• Program Pilah, Kumpul, Olah

Terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah, berbagai koridor kebijakan telah dibuat. Dalam kaitan dengan kebersihan dan pengolahan sampah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 11 November 2002 Kebersihan dan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 8 Februari 2003 tentang Sistem Pemilahan dan Pengumpulan Sampah.

- Pengomposan Rumah Tangga

BLH Kota Probolinggo memberikan setiap Rumah Tangga satu KOMPOSTER untuk dikelola oleh warganya. Contohnya di Perumahan Kopian Indah, BLH telah menyediakan KOMPOSTER AEROB ini secara cuma-cuma.

- Pengomposan kawasan

Di Kota Probolinggo, saat ini ada empat lokasi pengolahan sampah menjadi kompos. Lokasi

adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pengolahan Sampah dan Limbah yang menjadi induknya serta UPT Pengolahan Sampah Pasar Baru Kota Probolinggo hasil kerjasama dengan Yayasan Danamon Peduli. Kedua unit pengolahan tersebut untuk skala kawasan. Sedangkan dua unit lainnya termasuk skala lingkungan adalah Pengolahan Sampah di Perumahan Sumber Taman dan Perumahan Ketapang.

• Unit Pengolah Sampah di TPA

Proses pengolahan sampah organik menjadi kompos dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Komposting pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup.

Pengolahan sampah organik dengan pengomposan dirintis dari kerjasama dengan BPPT, sistem pengolahan sampah organik dan sampah halaman terpilah. Sampah bersumber dari masyarakat yang sudah melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah organik dan anorganik.

Kegiatan pengomposan dilaksanakan di areal komposting yang dibangun di atas sebuah lahan di dalam kompleks TPA (area sebelah timur), prasarana ini memiliki 2 unit bangunan terbuka untuk kegiatan operasional dan 1 unit bangunan kantor untuk kegiatan administratif dimana perkembangan proses pengomposan dicatat dan dipantau secara periodik dalam upaya mendapatkan hasil yang optimal dan memenuhi Standar Kualitas Produk. Sebagai penunjang aktifitas pengomposan, prasarana ini juga dilengkapi dengan 1 unit *Trash Crusher Machine* yang berfungsi untuk mencacah / menghancurkan sampah organik.

Fungsi utama yang menjadi landasan kerja UPTD Komposting adalah :

- Mengolah sampah organik menjadi produk yang bermanfaat;
- Mendesiminasikan pengolahan kompos dan pemanfaatannya sebagai bentuk pemberdayaan komunitas dan pendidikan.

Produk kompos dibuat tipe kompos biasa dan kompos granular dengan diberi pewarnaan (hitam dan putih) dan diberi merk produk, seperti ditampilkan pada tabel 4.

Pada tahun 2008 UPTD melengkapi dengan mesin pengolah plastik, namun belum dioperasikan karena menunggu catu daya listrik 110.000 watt.

Tabel 4 Jumlah Sampah Organik yang Diolah Menjadi Kompos

Tahun	Jumlah Sampah Organik yang Dikomposkan (Ton)	Jumlah Kompos (Ton)
2006	17,1	42,8
2007	122	48,8
2008	308	77

Sumber : Sonhadji, 2008

Pelibatan Komunitas

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dimulai dengan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam pemilahan dan pengumpulan sampah rumah tangga. Proses pembentukan Pokmas dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mulai tingkat RW maupun kelurahan yang selanjutnya diberikan pelatihan teknis dan penguatan kelembagaan

Satu kelompok masyarakat (pokmas) terdiri atas 10 hingga 15 rumah tangga yang bertugas melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik dari rumah tangganya masing-masing. Selanjutnya dikumpulkan dalam zak-zak plastik. Setelah terkumpul minimal 5 zak sampah organik, maka ketua Pokmas menghubungi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Komposting pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo agar sampah yang sudah terkumpul diambil petugas komposting untuk diproses menjadi kompos.

Untuk sampah anorganik yang masih bernilai ekonomi dapat langsung dijual ke pasar pengepul sampah. Hasil pengolahan sampah berupa kompos selanjutnya dikembalikan kepada Pokmas dengan ketentuan 70% untuk masyarakat dan 30% dikelola UPTD Komposting. Pengembalian kompos kepada Pokmas dimaksudkan sebagai penghargaan atas partisipasi pokmas dalam melakukan pemilahan dan pengumpulan yang sudah dimulai dari sumber. Sedangkan 30% yang dikelola UPTD sebagai bentuk jasa pengolahan sampah yang telah dilakukan. Pemanfaatan kompos oleh masyarakat diharapkan untuk memupuk tanaman di lingkungan atau kegiatan pertanian, selain itu Pokmas dapat menjual kompos kepada konsumen.

Pemerintah Kota Probolinggo tidak mengambil keuntungan dari proses ini, karena kegiatan ini merupakan bagian dari pelayanan masyarakat yang diberikan oleh Kota Probolinggo agar masyarakat termotivasi untuk meningkatkan sikap sehat dan bersih.

Satu kelompok masyarakat (pokmas) terdiri atas 10 hingga 15 rumah tangga. Kelompok ini bertugas mengumpulkan dan memilah sampah yang dihasilkan di lingkungan masing-masing. Jika sudah terkumpul, koordinator menghubungi rumah kompos agar sampahnya segera diambil. Hingga sekarang, sudah terbentuk kurang-lebih 100 kelompok masyarakat.

Organisasi Kemasyarakatan Bidang Pengelolaan Sampah

1. Paguyuban Peduli Sampah (PAPESA)

Dalam perkembangannya, Pokmas mengorganisasikan diri dalam wadah-wadah yang berfungsi mengkoordinasi kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yaitu dengan membentuk Paguyuban Peduli Sampah yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/257/KEP/425.012/2006 tanggal 28 September 2006. Selain itu Pemda memberikan legalitas terhadap keberadaan lembaga sosial masyarakat tersebut, organisasi ini diberikan alokasi dana untuk kegiatan operasional, dimana kelompok-kelompok dapat mengajukan proposal program dan sosialisasi serta studi banding.

Pembentukan PAPESA kota Probolinggo yang diprakarsai oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Komposting Kota Probolinggo ini bertujuan untuk :

- Memberikan pemahaman secara lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai berbagai kondisi, permasalahan dan potensi persampahan rumah tangga dan lingkungan;
- Menimbulkan kepedulian serta menciptakan wadah kegiatan bagi masyarakat untuk turut berperan serta dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga;
- Menciptakan dan mengembangkan kemandirian masyarakat agar mampu baik secara program maupun kelembagaan dalam melakukan pengelolaan persampahan rumah tangga;
- Mereduksi sampah rumah tangga yang dibuang ke Tempat Pengumpulan Akhir (TPA) melalui berbagai kegiatan pemanfaatan dan pengolahan sampah;
- Menciptakan *net working* dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui jalinan pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

2. Forum Jaringan Manajemen Sampah Kota (FORJAMANSA)

Sebagai wujud dari kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk turut berperan serta secara aktif dalam memecahkan dan mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan persampahan di Kota Probolinggo, pada tanggal 17 Maret 2005 telah dibentuk sebuah wadah bagi kegiatan pemikiran, perencanaan serta pengimplementasian berbagai program pengelolaan sampah yaitu Forum Jaringan Manajemen Sampah (Forjamansa) yang mana jaringan kegiatan forum tersebut dibentuk secara menyeluruh dan berjenjang hingga lapisan terbawah yaitu tingkat RT/RW (POKMAS). Forum ini bernaung di bawah jaringan tingkat nasional yaitu Jaringan Pengelolaan Sampah

Nasional (JALA-Sampah) yang dibentuk pada tanggal 14 Juni 2003.

Susunan kepengurusan FORJAMANSA terdiri dari Dewan Pertimbangan, Pengurus Harian dan Humas. Sedangkan bidang yang dijadikan sebagai fokus kegiatan terdiri dari 4 Pilar Garapan yaitu :

- a. Infrastruktur
- b. Regulasi
- c. Pemberdayaan Masyarakat
- d. Partnership

Beberapa program pengelolaan sampah yang telah dirumuskan dan dicanangkan Forum Jaringan Manajemen Sampah (FORJAMANSA) adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan sistem manajemen sampah, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, tenaga dan dana serta sosialisasi kegiatan pemilahan dan reduksi sampah.

3. Kegiatan Rembug KAHBI (Kampungku Hijau, Bersih dan Indah)

Adalah forum komunikasi publik yang bertujuan untuk mewujudkan Kampung Hijau Bersih dan Indah yang dilaksanakan secara bergiliran di tiap kelurahan di Kota Probolinggo. Rembug KAHBI dipimpin langsung oleh Walikota Probolinggo dengan didampingi oleh seluruh Kepala Unit Kerja termasuk Muspida. Rembug KAHBI dihadiri oleh perwakilan masyarakat kelurahan yang terdiri atas RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat dan LSM untuk diskusi atau urun rembug antara warga dengan pemerintah seputar masalah kebersihan dan keindahan di lingkungan mereka. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk dari upaya proaktif pemerintah dan warga masyarakat untuk secara bersama-sama mewujudkan peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengelola kebersihan di lingkungan mereka.

4. Paguyuban Eco-Pesantren

Adalah wadah bagi pondok pesantren memfasilitasi terwujudnya pondok pesantren berwawasan lingkungan. Program yang dilakukan adalah pengolahan sampah organik menjadi kompos dan memberikan sosialisasi kepada pondok pesantren di Kota Probolinggo dalam mengubah paradigma pengelolaan sampah di lingkungan pondok pesantren.

5. Paguyuban Kader Lingkungan (PKL)

Adalah wadah dari Kader Lingkungan PKK kecamatan dan kelurahan se-Kota Probolinggo yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan kebersihan khususnya dalam hal penanganan pemanfaatan sampah organik serta secara aktif menstimulasi pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi sampah sejak dari sumbernya yaitu dengan menggunakan pendekatan dan paradigma baru dalam

penanganan sampah yaitu *Reduce, Reuce dan Recycle*. Peningkatan peran kader lingkungan ini antara lain dengan memberikan pelatihan *social worker* dan Pelatihan Daur Ulang Sampah.

PEMBAHASAN

Peran Komunitas

Peran komunitas terhadap kegiatan pengelolaan sampah dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5 Peran Komunitas dalam Pengelolaan Sampah di Kota Probolinggo

No	Kegiatan	Pokmas	Papesa	Forja Mansa	Eco Pesantren	Rebug KAHBI	PKL
1	Pemilahan	√					√
2	Pengumpulan	√					√
3	Pemanfaatan Sampah Organik	√	√		√		√
4	Sosialisasi		√	√	√		√
5	Perencana Program		√	√			√
6	Peningkatan SDM / Pelatihan		√	√			√
7	Forum Dialog			√	√	√	
8	<i>Networking / Partnership</i>		√	√			
9	Mencari sumber dana		√	√			

Sumber : Hasil Analisis, 2009

Peran Pemerintah

Pemda banyak memfasilitasi gerakan partisipasi masyarakat dengan pelibatan *stakeholder* dan kerjasama kemitraan antara Pemda, masyarakat. Fasilitasi berupa pelatihan dan pendanaan terhadap aktivitas kelompok-kelompok peduli sampah sehingga memotivasi masyarakat dalam melakukan gerakan pengelolaan sampah dan menumbuhkan kerjasama yang baik masyarakat dengan Pemda.

Program-program Pemerintah telah menimbulkan *mutiplier effect* yang besar pengaruhnya terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat. Program ini telah menumbuhkan gerakan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan baik secara langsung melakukan pengolahan sampah maupun forum diskusi yang memberikan advokasi kepada berbagai *stakeholders* pembangunan Kota Probolinggo untuk memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Secara rinci peran pemerintah ditampilkan pada tabel 6.

Tabel 6 Peran Pemerintah

No	Kegiatan
1	Penetapan kebijakan
2	Sosialisasi
3	Pelatihan teknis
4	Penguatan kelembagaan
5	Pendanaan
6	Jasa pengolahan sampah
7	Dukungan legalitas
8	Forum dialog
9	Advokasi

Sumber : Hasil Analisis, 2009

Pola Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat

Pola pilah kumpul yang dilakukan masyarakat dan olah yang dilakukan oleh pemerintah ke unit pengomposan di TPA menciptakan pembagian peran yang baik antara masyarakat dan Dinas Kebersihan. Dari aspek penyediaan bahan baku

pengomposan, pola ini menjadi unit pengomposan di TPA dapat berkelanjutan.

Jika komitmen ini terus berjalan dan Pokmas-pokmas dapat mewujudkan pengolahan sampah terpadu berbasis 3R di sumber sampah dan TPA merupakan pemrosesan sampah. Fasilitas pengolahan sampah menjadi pupuk organik dapat membantu pemerintah daerah menyelesaikan timbunan sampah serta mengembangkan pertanian organik di Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya. Dalam kerjasama tersebut pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sebidang lahan, sedangkan pihak swasta membangun rumah kompos dan memberikan bantuan mesin-mesin produksi, peralatan-peralatan kerja dan pelatihan.

Reduksi Sampah

Pengelolaan persampahan Kota Probolinggo bisa dioptimalkan dengan penerapan konsep daur ulang dan *composting* untuk mengurangi timbulan sampah Kota Probolinggo. Pada tahun 2008, sampah permukiman yang dihasilkan adalah 512,11 m³/hari. Pada tahun 2008, komposisi sampah Kota Probolinggo adalah 76,14% sampah organik, sangat menunjang untuk didaur ulang untuk menjadi kompos dan 23,86% sampah anorganik. Jadi total sampah organik yang dapat diolah sebanyak 389,83 m³/hari. Melalui rangkaian proses sistem reduksi sampah domestik skala rumah tangga dan komunal akhirnya, jumlah sampah organik yang diolah menjadi kompos sebesar 272,88 m³/hari. Program pengolahan persampahan terpadu 3R menargetkan pengurangan sampah hingga 12-15%, yaitu sebanyak 32,75 m³/hari. Jadi prosentase sampah domestik yang berhasil direduksi adalah sebesar 6% atau sekitar 6,4 ton/hari. Tingkat keberhasilan yang cukup, dari target 2012 untuk reduksi sampah 12%-15% lewat program 3R.

Penerapan daur ulang dan komposting dapat mengurangi jumlah timbunan yang masuk ke TPA. Dalam konsep reduksi sampah dengan komposting dan daur ulang ini pada awal perencanaan tahun 2008 dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA sebanyak 6,4 ton/hari.

Manfaat Ekonomi

Program pengolahan sampah organik menjadi kompos adalah program yang bersifat *public servis* sehingga operasional pengelolaan program termasuk biaya operasional Paguyuban Peduli Sampah seluruhnya didanai dari APBD Kota Probolinggo. Komponen-komponen pembiayaan operasional program meliputi : gaji dan upah, alat tulis, bimbingan teknis dan sosialisasi, pengadaan bahan material penunjang, publikasi dan BBM transportasi. Sedangkan komponen Paguyuban Peduli Sampah meliputi biaya sosialisasi kepada masyarakat. Hasil pengolahan sampah berupa kompos selain dikembalikan kepada Pokmas sebesar 70% dan 30% dimanfaatkan oleh UPT Pengolahan Sampah dan Limbah selanjutnya dijual ke konsumen. Hasil penjualan ke konsumen dibedakan menjadi 3 macam yaitu penjualan melalui penitipan di stand-stand (membayar jika sudah laku), penjualan langsung kepada masyarakat umum di lokasi TPA dan penjualan kepada kelompok tani. Khusus penjualan kepada kelompok tani diberikan bantuan keuangan dalam bentuk subsidi harga sebesar 50% dari harga yang telah ditetapkan sebesar Rp. 750,-/kg, yaitu sebesar Rp. 350,-/kg. Pemberian subsidi harga kepada kelompok tani ditetapkan melalui Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2007. Hasil penjualan kompos disetorkan ke kas daerah.

Selain itu, ada manfaat lain yang diperoleh masyarakat yaitu pembuatan kerajinan dari sampah non organik. Ada usaha pembuatan souvenir di pokmas berupa tas dan dompet. Pekerjaan ini sebagian besar dilaksanakan oleh kaum perempuan.

Pembuat kerajinan dari sampah non organik dapat menjual kerajinannya langsung atau melalui koperasi yang didukung oleh kantor lingkungan hidup Kota Probolinggo. Masyarakat telah memisahkan sampah organik dan anorganik selama tiga tahun, dan pada dua tahun terakhir membuat kerajinan dari sampah plastik, mendapat tambahan penghasilan antara Rp. 20.000,- - Rp. 30.000,- per hari dari kerajinan ini. Masyarakat sangat bangga pada kegiatan yang dijalankannya. Sampah dapat membuat masalah, tetapi jika ditangani dan dimanfaatkan dengan baik, sampah bisa menambah penghasilan bagi keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pola pilah kumpul yang dilakukan masyarakat dan olah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah di unit pengomposan di TPA menciptakan pembagian peran dan kemitraan yang baik antara masyarakat dan pemda dalam pengelolaan sampah di Kota Probolinggo.
2. Pola pilah kumpul dan olah dapat meningkatkan/menghasilkan reduksi volume sampah domestik yang masuk TPA \pm 6,4 ton/hari (6%) dan masyarakat mendapat tambahan penghasilan antara Rp. 20.000,- Rp. 30.000,- per hari.
3. Pola pemasaran kompos dengan ketentuan 70% untuk masyarakat dan 30% dikelola UPTD Komposting meningkatkan penghargaan atas partisipasi pokmas dalam melakukan pemilahan dan pengumpulan yang sudah dimulai dari sumber.
4. Kunci keberhasilan dalam pengelolaan sampah adalah perubahan perilaku masyarakat serta adanya pembinaan dari tokoh penggerak masyarakat/fasilitator. Perubahan perilaku perlu didukung oleh kegiatan yang dapat menumbuhkan motivasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan penghargaan dan motif keuntungan ekonomi dan lingkungan.

Saran

Diharapkan peran serta masyarakat terus berlanjut. Kelompok masyarakat yang ada sekarang ini sangat membantu dalam proses pengolahan sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis. Pengelolaan sampah di sumber akan mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA).

Kegiatan pembuatan pupuk organik kompos di Kota Probolinggo supaya terus dikembangkan, sehingga dapat mereduksi sampah > 6,4 ton per hari dan sebaiknya direplikasi di daerah-daerah di Indonesia karena bermanfaat dalam penyediaan pupuk organik, menjaga kebersihan kota dan memberi manfaat ekonomi bagi pengelola kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artingsih, Ni Komang Ayu. 2008. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang). Tesis Program Magister Ilmu Lingkungan. Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Darwati, S, Anggraini, F, Murdiyati dan Widyahantari, R. 2008. Penerapan 3R di Kota

- Malang dan Probolinggo. Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan. 2003. *Executive Summary: National Action Plan* Bidang Persampahan. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KNSP-SP).
- Riatno, P., Setijati, H.E., dan Vidyaningrum, W., 2007. Studi Evaluasi Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R (Studi Kasus : Kec. Cilandak, Jakarta Selatan). *Jurnal Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti* Vol 4 No 1.
- Jakarta. Jurusan Teknik Lingkungan, FALTL, Universitas Trisakti.
- Program Kerja Bidang Kebersihan Tahun 2008. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.
- Sonhadji, M. 2008. Pelayanan Pengolahan Sampah Berbasis Komunitas di Kota Probolinggo. Badan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 18 Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
http://megapolitan.infogoe.com/dki_berhasil_reduksi_sampah_7_persen
<http://probolinggokota.go.id>